

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Menurut pandangan ekonomi baru, pembangunan berkaitan dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan dan juga pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dipandang sebagai perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja (Todaro, 2011). Pembangunan ekonomi juga dimaknai sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sektor sekunder dan atau tersier. Salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sector industry pengolahan. Oleh karena itu sector industry dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (*the leading sector*) terhadap perkembangan sector ekonomi lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya (Saragih, 2003).

Dalam teori ekonomi terdapat empat faktor produksi yang telah kita ketahui antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja

modal dan kewirausahaan. Dari keempat faktor produksi tersebut, faktor tenaga kerjalah yang memiliki peran penting karena faktor ini bertugas menjalankan faktor-faktor lain. Faktor tenaga kerja cukup dipengaruhi nilai upah yang ada serta banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang bekerja.

Akan tetapi terdapat masalah dan problematika mendasar yang dihadapi oleh negara berkembang. Masalah pokok dan isu pembangunan yang dihadapi adalah kemiskinan dan pengangguran, tidak terkecuali Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 264 juta jiwa, sebanyak 25,95 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan atau sebanyak 9,82% dari total penduduk Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain permasalahan kemiskinan, permasalahan yang muncul dalam pembangunan adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran merupakan fenomena empiris yang terjadi di Indonesia. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia akan meningkatkan jumlah pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur pada tahun 2017 mencapai 7,04 juta jiwa. Sementara pada pertengahan tahun 2018 ini mencapai 6,87 juta jiwa. Jumlah ini bisa jadi semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana dalam rangka agenda pembangunan ekonominya tidak lain adalah bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, salah satunya adalah masalah pengangguran. Sejalan dengan

hal tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya maka diperlukan berbagai macam jalur dalam pembangunan, salah satunya adalah melalui jalan industrialisasi. Menurut Jhingan tentang perubahan struktural mengandung arti peralihan masyarakat tradisional menjadi ekonomi industri modern yang mencakup peralihan lembaga, sikap social dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan social ini akan menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, produktivitas buruh meningkat, stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan struktural tersebut, industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Industri yang dipandang strategis adalah industri manufaktur yang diharapkan dapat mendorong serta menggerakkan perekonomian disuatu daerah. Sisi lain Indonesia juga memiliki jumlah penduduk atau angkatan kerja yang sangat tinggi. Sektor manufaktur sendr dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang melimpah dan pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja yang besar (Azhar & Arifin, 2011).Selain itu, salah satu fackor penting dalam pembangunan ekonomi adalah keterlibatan sumber daya manusia, karena jumlah penduduk dalam suatu negara merupakan unsur utama pembangunan. Disisi lain ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang menyebabkan terjadinya masalah pengangguran. Untuk mencegah hal itu, maka penyediaan lapangan kerja yang memadai harus tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan jumlah angkatan kerja demi menjaga kestabilan ekonom suatu Negara (Arif & Juanta, 2016).

Perluasan lapangan kerja dibutuhkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja, karena ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan persediaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Permasalahan yang dihadapi dalam ketenagakerjaan ialah terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang cukup besar sehingga terjadi peningkatan pengangguran.

Tabel 1. 1
Penduduk Berumur 15 ke Atas Menurut jenis kegiatan di Karesidenan Kedu
Jawa Tengah tahun 2012-2017

Tahun	Jenis Kegiatan (Jiwa)		
	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka
2012	2534394	2430036	106358
2013	2433925	2308921	125004
2014	2597630	2467189	130441
2015	2567140	2463099	104041
2016	2567140	2463099	104041
2017	2590929	2492228	98701

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan table 1.1 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Karesidenan Kedu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 fluktuatif. Jumlah angkatan kerja di karesidenan kedu pada tahun 2012 sebanyak 2534394 jiwa, angkatan kerja yang terserap untuk bekerja sebanyak 2430036 jiwa, dan sebanyak 106358 jiwa di karesidenan kedu merupakan pengangguran terbuka pada tahun 2012. Penurunan angkatan kerja sebanyak 100.469 jiwa pada tahun 2013 dari tahun sebelumnya tidak

pula menurunkan angka pengangguran di karesidenan kedu pada tahun ini, justru tingkat pengangguran bertambah menjadi 125.004 jiwa, dan orang yang bekerja juga mengalami penurunan menjadi 2.308.921 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja di karesidenan kedu mengalami peningkatan sebanyak 163.705 jiwa menjadi 2597630 jiwa, dan jumlah orang yang bekerja juga mengalami peningkatan menjadi 2467189 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2014 pengangguran justru mengalami peningkatan sebanyak 5.437 jiwa, sehingga pengangguran terbuka di karesidenan Kedu pada tahun 2014 mejadi 130.441 jiwa.

Pada tahun 2015 terjadi penurunan tingkat pengangguran pada karesidenan kedu yaitu sebanyak 26.400 jiwa dari tahun 2014, akan tetapi jumlah orang yang bekerja juga mengalami penurunan yang relative sedikit yaitu 4.090 jiwa, jadi total dari orang yang bekerja di karesidenan kedu pada tahun 2015 menjadi 2.463.099 jiwa. Jadi jumlah angkatan kerja di karesidenan Kedu Jawa Tengah sebanyak 2.567.140 jiwa. Sementara pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di karesidenan Kedu Jawa Tengah sebanyak 2.590.929 jiwa, dengan angka pengangguran terbuka yang relative menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 98.701 penduduk di jaredisenan Kedu merupakan pengangguran terbuka. Sementara jumlah tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 2.492.228 jiwa, angka ini cenderung naik dari angka sebelumnya yaitu 2.567.140 pada tahun 2016.

Dari table diatas, bias disimpulkan bahwa dari ketiga angka tersebut, yaitu angkatan kerja, orang yang bekerja dan juga pengangguran terbuka di karesdenan Kedu Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2017 cenderung mengalami fluktuatif.

Naik turunnya jumlah penduduk bekerja disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya bencana alam, PHK, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, serta munculnya investasi di wilayah tersebut. Penyerapan tenaga kerja disuatu wilayah sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada karena akan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Menurut (Mohamed, 2016), sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menyebabkan permintaan tenaga kerja yang tinggi. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang tersedia menjad cukup terampil dan kompeten. Namun di negara berkembang, permintaan tenaga kerja terhitung rendah karena pengaruh perlambatan ekonomi yang akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja.

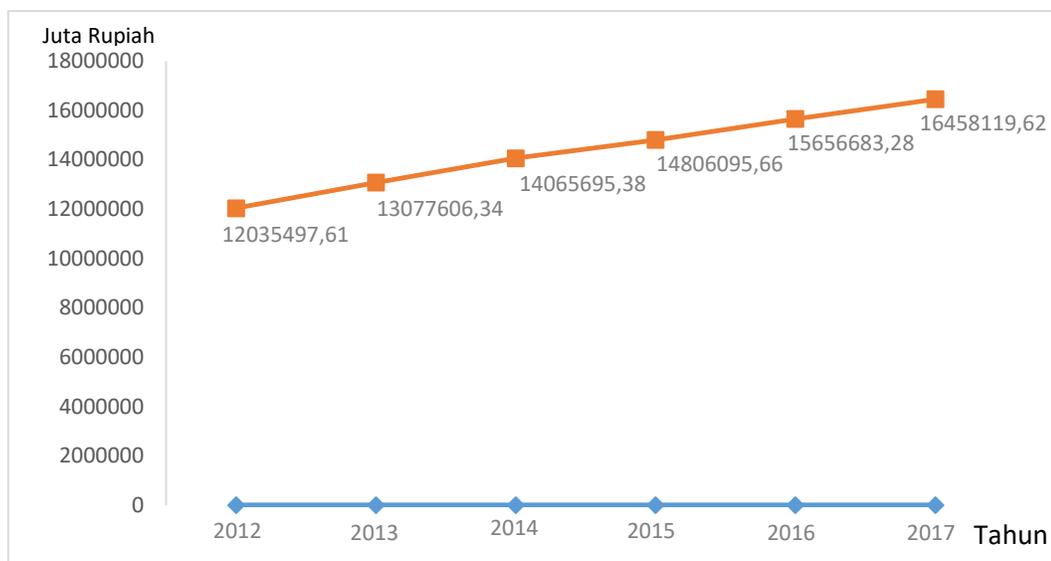
Besarnya tingkat pengangguran pun menunjukkan rendahnya kualitas SDM suatu negara dan rendahnya kemampuan tenaga kerja masuk dalam dunia kerja. Tingginya tingkat pengangguran juga mengindikasikan inefisiensi dalam perekonomian karena potensi SDM baik yang terdidik maupun tidak terdidik yang tidak bisa berkontribusi dalam perekonomian (Yuliadi, 2016).

Hal lain yang tak terlepas dari masalah ketenagakerjaan adalah adanya upah. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor 05/Men/1989 tanggal 5 Mei 1989 tentang upah minimum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/1999, upah minimum didefinisikan upah bulanan terendah yang terdiri dari adanya gaji pokok dan tunjangan tetap (Sulistiawati, 2012). Peraturan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang banyak dilakukan diberbagai negara. Pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, upah minimum sebagai alat proteksi pekerja untuk mempertahankan agar upah yang diterima tidak menurun serta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi perusahaan guna mempertahankan produktifitas pekerja.

(Fahreza, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kenaikan upah berpengaruh searah terhadap meningkatnya permintaan tenaga kerja, *ceteris paribus*. Namun terkadang, beberapa kasus mengungkapkan bahwa kenaikan upah memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Menurut kuncoro (2002), kenaikan upah dapat mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Pada saat tingkat upah mengalami kenaikan, *ceteris paribus*, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut akan mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang lebih murah untuk mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung akan mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksi.

Dalam hukum Okun terdapat hubungan negatif dari jumlah pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana saat PDB mengalami kenaikan sebesar 2%, maka akan mengurangi pengangguran sebesar 1%. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya kontribusi tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa sehingga mempengaruhi pendapatan nasional dalam suatu negara.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Gambar 1. 1
PDRB Karsidenan Kedu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (juta rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa PDRB sektor industry di karesidenan Kedu mengalami kenaikan dalam kurun waktu enam tahun, dari 2012 sampai dengan 2017. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa di karesidenan kedu sedang mengalami prosen industrialisasi terbukti dengan meningkatnya angka PDRB sektor industry dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

Karesidenan Kedu sedang memasuki fase industrialisasi yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bila dilihat Karesidenan Kedu yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota yang memiliki penduduk yang relatif banyak di Provinsi Jawa Tengah. Permintaan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan juga tidak terlepas dari beberapa aspek antara lain pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk mendukung investasi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung pengelolaan lebih optimal serta kemajuan teknologi untuk mendorong tingkat produktivitas. Menurut (Arsyad, 2010) sektor yang diyakini dapat menumbuhkan sektor-sektor lain adalah sektor industri. Sektor industri dijuluki sebagai sektor pemimpin (leader sector), karena dengan adanya pembangunan sektor industri akan memacu pembangunan pada sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini akan menyebabkan peluang kerja yang semakin besar dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri (UU NO.3 tahun 2004) Industri terbagi menjadi kedalam 4 struktur yaitu industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga. Tolak ukur dalam mengklasifikasikan sebagai industri adalah melalui jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan dan jumlah investasi.

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB di Karesidenan Kedu maupun di Jawa Tengah, sisi lain penyerapan tenaga kerja yang cenderung berfluktuasi selama enam tahun kebelakang merupakan sebuah permasalahan. maka dari itu tertarik bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Karesidenan Kedu Jawa Tengah. Dengan judul **“Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Penrmintaan Tenaga Kerja Di Karesidenan Kedu Jawa Tengah Periode 2012 – 2017”**.

B. Batasan Masalah

Agar lebih jelas mengenai permasalahan diatas, maka perlu dilakukan batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Subjek penelitian ini dibatasi di wilayah Karesidenan Kedu Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonosobo, Temanggung dan Kota Magelang.
2. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari sektor Industri Pengolahan dan tahun yang dijadikan objek penelitian adalah 2012 sampai dengan 2017.
3. Variable yang digunakan yaitu PDRB Sektor Industri, Upah minimum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Unit Usaha Industri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah peneltian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor industri terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada sector industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan kedu Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Unit Usaha terhadap permintaan tenaga kerja pada seckor industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah pada?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh PDRB sektor industri terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah pada tahun 2012 – 2017
2. Mengetahui apakah upah minimum mempunyai pengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah pada tahun 2012 – 2017
3. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah pada tahun 2012 – 2017

4. Mengetahui apakah jumlah unit usaha mempunyai pengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Kedu Jawa Tengah pada tahun 2012 – 2017

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya,

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kontribusi sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Kedu Jawa Tengah

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kontribusi sektor industri pengolahan terhadap permintaan tenaga kerja di Karesidenan Kedu Jawa Tengah

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru untuk dibaca serta dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan membutuhkannya.